

DITERIMA DARI <i>Permohonan</i>	
Hari	<i>Jumat</i>
Tanggal	<i>4 Juni 2021</i>
Jam	<i>10.58 WIB</i>

Jakarta, 4 Juni 2021

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Perihal : **Permohonan Uji Materil** Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Juncto Pasal 10 ayat (1) Bertentangan Dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai adanya penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah secara langsung terhadap BUMN/BUMD, mendapatkan penugasan secara langsung dari Pemerintah untuk mengelola Sumber Daya Alam atau melaksanakan pelayanan umum atau mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk mengelola keuangan negara

Dengan hormat,

Perkenalkanlah kami, **IWAN GUNAWAN, S.H.,M.H., DR. SUARTINI S.H.,M.H., VIRZA ROY HIZZAL LUBIS, S.H., M.H. ADE YAN YAN HASBULLAH, SH** Advokat dan atau Konsultan Hukum yang berkantor pada (**Sugiharto, Gunawan & Partner**) **SGP Law Office** beralamat MTH Square GF A4/A Jl. MT Haryono Kav 10 Cawang, Jakarta Timur 13330, Hp. 08567618877 E-mail : lwan_Gunawan 1926@Yahoo.com. Bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **MUHAMMAD HELMI KAMAL**
Nik : 3174011012660008
TTL/Umur : Medan, 10 Desember 1966 / 55 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganeggaran : Indonesia
Alamat : Jl. H. Ramli no 59 RT 004 RW 003, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Bahwa Permohonan *Judicial review* Terhadap Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Juncto Pasal 10 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai sebagai penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah secara langsung terhadap BUMN/BUMD dan mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum terhadap lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, yang diajukan dengan sistematika Permohonan sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- III. Legal Standing Pemohon
- IV. Pokok Permohonan
- V. Petitum

I. PENDAHULUAN

Bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang melindungi Hak Konstitusional Warga Negara berdasarkan hukum Peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana setiap warga negara dipandang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, pemerintahan termasuk dan tidak terbatas pada kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum baik dalam melakukan kegiatan sehari-hari maupun pada saat dilakukan pemeriksaan, baik itu sebagai subjek hukum perseorangan dan atau suatu badan hukum privat yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

Bahwa meskipun demikian dalam pelaksanaannya terdapat perlakuan berbeda yang dialami oleh pemohon sebagai warga negara dengan warga negara lainnya yang seharusnya memiliki hak konstitusional yang sama dan mendapatkan perlakuan sama di depan hukum, perbedaan perlakuan tersebut sebagai akibat dari perbedaan dalam penafsiran dan penerapan hukum, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi masyarakat;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU-Pres/XVI/2019 tanggal 27 Juni 2019, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 hal 1936 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) mendefinisikan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. **Berdasarkan definisi tersebut maka untuk dapat mengetahui apakah Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri merupakan BUMN atau bukan salah satunya adalah dengan cara mengetahui komposisi modal atau saham dari kedua bank tersebut;**
- (2) bahwa modal atau saham Bank BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT BNI Life Insurance (bukti PT-20). Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Mandiri Sekuritas (bukti PT-21). Dengan demikian, oleh karena tidak ada modal atau saham dari negara yang bersifat langsung yang jumlahnya sebagian besar dimiliki oleh negara maka kedua bank tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan kata lain modal atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas, terdapat entitas subyek hukum berbeda antara BUMN dengan Anak Perusahaan BUMN, dimana **keduanya dipisahkan dengan ada atau tidaknya Penyertaan Modal Secara Langsung yang dilakukan oleh Pemerintah**, penyertaan Badan Usaha Milik Negara pada suatu Perseroan tidak serta merta menjadikan Perseroan tersebut sebagai Badan Usaha Milik Negara, akan tetapi statusnya tetap sebagai Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mengikuti Pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam halaman 37 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pid.Sus sebagai Berikut:

“Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman adalah kewenangan Judex Facti dan hukuman tambahan tidak dibebankan kepada Terdakwa karena sejatinya kerugian yang diderita oleh PT. Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT.

Pertamina (Persero) bukanlah merupakan kerugian keuangan negara yang riil (hanya merupakan penurunan nilai yang fluktuatif) dan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVI/2019 tanggal 27 Juni 2019 menyatakan bahwa **“Penyertaan dan penempatan modal BUMN dalam anak Perusahaan BUMN tidak menjadikan anak perusahaan menjadi BUMN”**

Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Bahwa selanjutnya didalam Ketentuan pasal 10 ayat (1) UU nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, mengatur mengenai wewenang BPK RI dalam menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, secara normatif BPK RI hanya memiliki tugas dan kewenangan dalam memeriksa sampai dengan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang mengelola Keuangan Negara;

Bahwa tidak adanya tafsir yang jelas dan tegas mengenai ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dalam prakteknya menimbulkan kesewenang-wenangan hukum, yang mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda antara Anak perusahaan BUMN yang satu dengan Anak Perusahaan BUMN yang lain, bahkan terhadap perusahaan yang secara jelas dan tegas dalam Anggaran dasar bukan merupakan anak perusahaan BUMN dan bukan mengelola keuangan negara, melainkan mengelola Dana pensiun suatu Badan Usaha Milik Negara yang berasal dari luran

Pegawai Badan Usaha Milik Negara justru dikategorikan sebagai keuangan negara, sehingga dalam hal terjadi penyimpangan, dianggap sebagai perbuatan tindak pidana korupsi meskipun bukan perbuatan tindak pidana korupsi yang dikehendaki oleh undang-Undang;

Bahwa sesuai dengan Prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya diri sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain "*(nullus/nemo commodum copere potest de injuria sua propia)*", maka dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara sebagai cerminan dari adanya persamaan dimuka hukum diperlukan adanya penafsiran yang nyata dan pasti terhadap kewenangan BPK RI dalam menghitung kerugian negara.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*"
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi--**, menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*".

3. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. **Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** menyatakan "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*";
4. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi**, menyatakan:
"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
5. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi**, menyatakan:
"Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi".
6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal dalam undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya,

Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) *Juncto* Pasal 10 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai adanya penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah secara langsung terhadap BUMN/BUMD dan mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum terhadap lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lalu diubah kembali dengan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi** yang menyatakan:
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perseorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur didalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan hukum privat, atau (d) Lembaga Negara."
2. Bahwa selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lalu diubah kembali dengan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi** (Untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan: "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 / PUU- III/ 2005 dan Putusan Nomor 10/PUU-III/2005, Mahkamah telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - 1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - 3) Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (Khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) Adanya hubungan sebab-akibat (*Causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk di uji;
 - 5) Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Penjelasannya menegaskan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :*
 - a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *Badan hukum public atau privat; atau*
 - d. *Lembaga Negara.*
 - Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menegaskan,

Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Bahwa adapun uraian mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon akan disampaikan dalam Posita Permohonan pada bagian berikutnya;
5. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan;
 6. Bahwa sejak bulan **Agustus 2013**, Pemohon telah ditunjuk **sebagai Presiden Direktur (Presdir) Dana Pensiun Pertamina** (selanjutnya disebut **DP Pertamina**) dan "berhenti" terhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 dan sekarang sedang menjalani hukuman dari Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/PID.SUS/TPK/2017/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 7/Pid.TPK/2018/PT DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K/PID.SUS/2018, karena dianggap telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi;
 7. Bahwa selama menjabat sebagai Presdir DP Pertamina, Pemohon tidak pernah menyimpang dan melanggar hukum, terutama tidak menyimpang dari UU 11/1992, Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun ketentuan hukum lainnya. Dimana hal ini dapat diketahui dari hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik terhadap DP Pertamina pada periode Pemohon mengurus DP Pertamina, yaitu:
 - a. Pemeriksaan (audit) Akuntan Publik tahun buku 2014 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP, bukti P-1 dan P-2);
 - b. Pemeriksaan (audit) Akuntan Publik tahun buku 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP, bukti P-3 dan P-4);

8. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut **BPK**) melakukan "pemeriksaan investigatif" terhadap DP Pertamina, khususnya terkait dengan pembelian saham PT. Sugih Energy, Tbk di BEI adalah dengan sebutan SUGI (selanjutnya dalam Permohonan ini disebut **saham SUGI**);
9. Bahwa pemeriksaan BPK dan tuduhan Korupsi keuangan negara di DP Pertamina yang dialamatkan kepada Pemohon bermula dari adanya audit BPK dan pemahaman bahwa kekayaan DP Pertamina adalah bagian dari kekayaan negara dan/atau keuangan negara padahal kekayaan DP Pertamina antara lain dihimpun dari "iuran pemberi kerja" *in casu* PT. Pertamina. Kekayaan DP Pertamina "terpisah" dari kekayaan pendirinya *in casu* pemberi kerja (i.c PT. Pertamina), pemeriksaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh OJK. Sedangkan mengenai pemeriksaan keuangan internal dilakukan oleh Akuntan Publik bukan oleh BPK RI;
10. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan Pemeriksaan terhadap perkara aquo berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Bahwa tidak adanya tafsir yang tegas dari tugas dan kewenangan BPK RI dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan tindakan sewenang-wenang, karena secara nyata dan pasti tidak ada batasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang seharusnya dimaknai sebagai adanya penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah secara langsung terhadap BUMN/BUMD atau Lembaga lain yang mendapatkan penugasan untuk mengelola sumber daya alam dan atau mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan pelayanan umum terhadap masyarakat;
12. Bahwa telah menjadi fakta, Pemohon menjadi terpidana melakukan korupsi oleh Badan Negara, disebabkan norma hukum (objek uji materil) tersebut diatas tidak jelas dan tidak tegas sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda

oleh badan negara, dalam hal ini BPK. Sehingga karenanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. Padahal, **UUD 1945 menegaskan**,

Pasal 1 ayat (3) : *"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"*.

Pasal 28D ayat (1) : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*.

13. Bahwa setelah menjadi terdakwa korupsi dan dihukum pidana, Pemohon dan keluarganya juga menanggung malu serta merasa terhina dikalangan masyarakat, termasuk menanggung rasa tidak aman. Padahal **UUD 1945 menegaskan**,

Pasal 28G ayat (1) : *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*.

14. Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan ini dan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

IV. POKOK PERMOHONAN

1 Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 10 Ayat (1) mengatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat (1)

"BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”

Pasal 10 Ayat (1)

“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”

- 2 Bahwa frasa Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara sepanjang tidak dimaknai dengan Adanya Penyertaan Modal secara Langsung dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Penugasan Pengelolaan Sumber Daya Alam atau Pemberian fasilitas untuk pelayanan kepentingan Umum adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak memberikan Kepastian dan Persamaan di muka Hukum padahal Indonesia merupakan negara Hukum;
- 3 Bahwa berdasarkan hal tersebut batu uji dalam Permohonan Aquo adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) sebagai berikut:
 - Pasal 1 Ayat (3) : “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”
 - Pasal 28D ayat (1) : *Setiap Orang berhak atas pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*
 - Pasal 28G ayat (1) : *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

- 4 Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sepanjang frasa Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, dalam prakteknya tidak memperlihatkan kejelasan makna dan batasan sehingga warga negara tidak mendapatkan kepastian atas frasa tersebut. Hal ini tentu tidak mencerminkan prinsip negara hukum dimana sebagai negara yang berdasarkan hukum, seharusnya dapat memberikan keteraturan serta kepastian hukum bagi setiap warga negara, mengingat dalam penerapannya untuk Anak Perusahaan BUMN atau Badan lain yang mengelola Dana Pensiun dari Karyawan BUMN, meskipun tidak ada Penyertaan Modal dari Pemerintah, tidak mendapat tugas dan fasilitas dari pemerintah justru dianggap dan diperlakukan sama dengan Badan Usaha Milik Negara;
- 5 Bahwa BPK RI atas permintaan dari Penyidik, akan melakukan Audit Investigatif terhadap Anak Perusahaan BUMN dan Badan Lain yang mengelola uang dari Karyawan BUMN, kemudian hasil dari audit BPK RI menjadi legitimasi bagi Penyidik bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat kerugian negara karena telah dilakukan perhitungan oleh BPK RI.
- 6 Bahwa Pemeriksaan BPK RI terhadap Anak Perusahaan BUMN dan atau Badan Lain yang mengelola Uang dari Karyawan BUMN seperti Dapen Pertamina dan menyatakan ada kerugian negara dalam kegiatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang dengan tegas menyatakan: *"Setiap Orang berhak atas pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*
- 7 Bahwa anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk keuangan negara. Modal anak perusahaan BUMN/BUMD adalah dari BUMN/BUMD, bukan dari kekayaan negara. Hal ini jelas berbeda dengan modal BUMN/BUMD yang

berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN/APBD atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN/BUMD secara korporasi. Menempatkan kekayaan negara untuk dikelola secara korporasi menghasilkan manfaat bagi peningkatan perekonomian negara. Oleh karena itu, apabila dibentuk sebuah anak perusahaan BUMN/BUMD dan BUMN/BUMD tersebut melakukan penyertaan modal sebagai perusahaan induk, hal itu berarti bahwa modal tersebut bukan berasal dari negara, melainkan dari BUMN/BUMD tersebut yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemegang saham. Dalam hal laporan keuangan pun, anak perusahaan BUMN/BUMD melapor ke BUMN/BUMD selaku pemegang sahamnya dan bukan ke negara. Berdasarkan konstruksi tersebut dapat diartikan bahwa apabila BUMN/BUMD sebagai badan hukum membentuk anak perusahaan serta memiliki saham di dalamnya, maka pemilikan saham dalam anak perusahaan tersebut berasal dari kekayaan BUMN/BUMD, bukan dari kekayaan negara. Dapat dikatakan juga bahwa anak perusahaan BUMN/BUMD tidak tunduk pada Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, melainkan tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas;

- 8 Bahwa terkait status dari anak perusahaan BUMN sebenarnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, halaman 1936 telah memberikan *Pertimbangan Hukum* sebagai berikut:
Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan persyaratan Calon Wakil Presiden Paslon 01 di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- (1) bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) mendefinisikan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. **Berdasarkan definisi tersebut maka untuk dapat mengetahui apakah Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri merupakan BUMN**

atau bukan salah satunya adalah dengan cara mengetahui komposisi modal atau saham dari kedua bank tersebut;

(2) bahwa modal atau saham Bank BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT BNI Life Insurance (bukti PT-20). Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Mandiri Sekuritas (bukti PT-21). Dengan demikian, oleh karena tidak ada modal atau saham dari negara yang bersifat langsung yang jumlahnya sebagian besar dimiliki oleh negara maka kedua bank tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan kata lain modal atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN;

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas, terdapat entitas subyek hukum berbeda antara BUMN dengan Anak Perusahaan BUMN, dimana **keduanya dipisahkan dengan ada atau tidaknya Penyertaan Modal Secara Langsung yang dilakukan oleh Pemerintah**, penyertaan Badan Usaha Milik Negara pada suatu Perseroan tidak serta merta menjadikan Perseroan tersebut sebagai Badan Usaha Milik Negara, akan tetapi statusnya tetap sebagai Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
9. Selain itu, dalam perkara di atas, Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, dalam Salinan putusan Mahkamah Konstitusi a quo memberikan pendapat perbedaan antara BUMN dan anak perusahaan BUMN, yaitu:

"maka, disinilah letak perbedaan antara BUMN dengan anak perusahaan BUMN, karena yang menentukan badan usaha itu merupakan BUMN adalah sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, sedangkan anak perusahaan BUMN didirikan melalui penyertaan saham milik negara pada BUMN pada BUMN lain sehingga sebagian saham dimiliki oleh BUMN lain yang menjadi anak perusahaan BUMN (penyertaan modal negara secara tak langsung). Dengan tafsir gramatikal dan teleologis dapat dikatakan di sini bahwa BUMN dengan anak perusahaan BUMN

merupakan entitas hukum yang berbeda. Namun ada 2 (dua) kriteria secara bersyarat yang dapat memperlakukan anak perusahaan BUMN sama dengan BUMN yaitu, jika pada suatu saat: 1. Mendapat penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau 2. Mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN."

10. Bahwa terkait dengan adanya penyertaan modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Mahkamah Konstitusi didalam Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011 yang diputus Pada Tanggal 25 September 2012 dengan Pertimbangan Hukum Sebagai berikut:

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN), Pasal 1 angka 1 dan angka 10 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Dengan demikian BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT);

11. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, tidak harus dimaknai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan 62/PUU-XI/2013 yang menegaskan Keuangan Negara yang dikelola oleh BUMN tetap terletak di ranah Keuangan Negara, karena apabila kita telaah lebih jauh kedua putusan terdahulu belum mengatur secara Eksplisit status keuangan yang dikelola oleh BUMN yang melakukan penyertaan modal terhadap Anak Perusahaan BUMN, belum ada pula ketentuan Anak Perusahaan BUMN sebagaimana yang

diperlakukan sama dengan BUMN sehingga termasuk didalam keuangan Negara;

12. Bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum tersebut, Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, sehingga menjadi jelas kriteria dan syarat Anak Perusahaan BUMN yang diperlakukan sama dengan BUMN;
13. Bahwa didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, dimana didalam Ketentuan Pasal 2A, mengatur ketentuan sebagai berikut:
 - (1) *Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
 - (2) *Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar;*
 - (3) **Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas, bertransformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas tersebut;**
 - (4) *Kekayaan negara yang bertransformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi kekayaan BUMN atau Perseroan Terbatas tersebut;*

- (5) Kepemilikan atas saham/modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas dicatat sebagai investasi jangka panjang sesuai dengan presentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN atau Perseroan Terbatas;
- (6) Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut;
- (7) Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut:
 - a. **Mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau**
 - b. **Mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN;**

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2A PP No. 72 Tahun 2016 sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah sebenarnya menghendaki adanya pengelolaan terpisah antara keuangan negara dengan BUMN, sebagaimana ketentuan ayat (4) yang menyatakan harta benda yang sudah diserahkan kedalam BUMN menjadi harta benda milik dari BUMN, karena yang dicatat dalam keuangan negara bukan lagi jumlah yang disetorkan, melainkan jumlah kepemilikan sahamnya sehingga mengenai keuntungan dan kerugian BUMN tidak dicatat dalam keuangan negara;

15. Bahwa sampai dengan permohonan ini diajukan, arah Politik hukum di Indonesia belum dapat memberlakukan prinsip hukum **Lex specialis derogat legi generali**, karena penegak hukum ketika melihat peluang untuk melakukan penafsiran atas suatu ketentuan terutama ketentuan pidana, secara serta merta akan menafsirkan untuk memberlakukan hukum pidana dengan hukuman pidana yang seberat-beratnya sebagai sebuah bentuk "prestasi", sehingga semangat untuk mempidanakan lebih besar ketimbang menegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

16. Bahwa Menurut pendapat Prof.Dr.Eddy O.S Hiariej, S.H.,M.Hum didalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 hal 35, memberikan pendapatnya mengenai suatu delik terdapat *delik sebagai Tatbestandmassigkeit* dan *delik sebagai weseschau*, secara sederhana *tatbestandmassigkeit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur delik yang dirumuskan, sedangkan *wesenschau* mengandung makna suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang undang, meskipun demikian dalam prakteknya seringkali para penegak hukum tidak melaksanakan ketentuan tersebut dengan tetap memberikan hukuman meskipun hal tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana;
17. Bahwa hal tersebut dapat terlihat dalam penanganan tindak pidana korupsi beberapa tahun belakang ini, dimana semangat menghukum dengan delik perbuatan tindak pidana korupsi lebih besar, ketimbang memberlakukan undang-undang yang seharusnya mengatur tindakan tersebut, seperti misalnya yang dilanggar adalah peraturan internal perusahaan. Sebagaimana yang terjadi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi PT. jwasraya (BUMN), Perkara Tindak Pidana Korupsi PT. Danareksa Sekuritas (Anak perusahaan BUMN), Dapen pertamina (Bukan BUMN dan Bukan Anak Perusahaan BUMN), Perkara Dapen PKT (Anak Perusahaan BUMN);
18. Bahwa dari beberapa contoh penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut diatas, dan dengan Badan Pemeriksa Keuangan yang menafsirkan tugas dan wewenangnya secara umum, hal ini akan berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum. Apabila ini dibiarkan secara terus menerus tanpa ada tafsir yang jelas dan pasti atas kewenangan BPK sebagaimana tercantum didalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006, dimana BPK seakan memiliki ruang lingkup yang sangat luas, pada akhirnya semua akan dinyatakan menjadi kerugian negara dan semua akan menjadi tindak pidana korupsi pada akhirnya;

19. Bahwa meskipun terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia baik dalam tingkat Kasasi maupun Permohonan Peninjauan Kembali yang pada akhirnya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121K/Pid.Sus/2020 tanggal 9 Maret 2020 atas nama Terdakwa Karen Agustiawan (mantan Direktur Utama Pertamina), Putusan Mahkamah Agung No. 3849/K/Pid.Sus/2019 tanggal 2 Desember 2019 atas nama Terdakwa Ferefederick ST Siahaan (mantan Direktur Keuangan Pertamina), Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019, akan tetapi terdakwa harus dirampas kemerdekaannya dan menempuh proses serta tahapan yang panjang untuk mendapatkan keadilan atas suatu hal yang sejak awal dapat dinyatakan secara tegas dan pasti bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi;

20. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, memberikan beberapa pertimbangan terkait Anak Perusahaan BUMN sebagai berikut:

- **Bahwa Penyertaan dan penempatan modal BUMN dalam anak Perusahaan BUMN tidak serta merta menjadikan anak perusahaan menjadi BUMN** Sebagaimana tercantum didalam halaman 37 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pid.Sus sebagai Berikut:

*"Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman adalah kewenangan Judex Facti dan hukuman tambahan tidak dibebankan kepada Terdakwa karena sejatinya kerugian yang diderita oleh PT. Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) bukanlah merupakan kerugian keuangan negara yang rill (hanya merupakan penurunan nilai yang fluktuatif) dan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVI/2019 tanggal 27 Juni 2019 menyatakan bahwa **"Penyertaan dan penempatan modal BUMN dalam anak Perusahaan BUMN tidak menjadikan anak perusahaan menjadi BUMN"***

- **Bahwa terkait dengan Kerugian yang dialami oleh anak Perusahaan BUMN tidak serta merta dapat digolongkan kedalam Kerugian Keuangan Negara** Sebagaimana tercantum didalam pertimbangan hukum pada halaman 38 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pid.Sus Sebagai Berikut:

"Bahwa Keuangan Anak Perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVI/2019 tanggal 27 Juni 2019 sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina Hulu Energi sebagai anak Perusahaan PT. Pertamina (Persero) bukanlah Kerugian Keuangan Negara oleh karena PT. Pertamina Hulu Energi sebagai anak Perusahaan PT. Pertamina tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang BUMN"

- **Bahwa adanya kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina Hulu Energi (PT. PHE) dalam melakukan kegiatan bisnis merupakan Resiko Bisnis,** Sebagaimana tercantum didalam halaman 38 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pid.Sus,Sebagai Berikut:

Bahwa adalah fakta (Notoire Feiten) bahwa Oil Company penuh dengan resiko karena tidak ada Parameter yang pasti untuk menentukan berhasil atau gagalnya suatu Explorasi sehingga apa yang terjadi di Blok BMG Australia sebagaimana yang dialami oleh seluruh perusahaan migas dunia merupakan hal yang lumrah sehingga Adagium No Risk No Business berlaku lebih nyata

- **Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, merupakan Pengejawantahan dari Prinsip Business Judgment Rule yang dilakukan semata-mata demi kepentingan perusahaan sehingga tidak dapat dituntut secara pidana,** Sebagaimana tercantum didalam halaman 38 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pid.Sus,Sebagai Berikut:

“Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran Direksi PT. Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT. Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga Langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Pertamina dan Komisaris Utama PT. Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah Business Judgment Rule, ditandai tiadanya unsur kecurangan (Fraud), benturan kepentingan (Conflict Of Interest), Perbuatan Melawan Hukum dan Kesalahan yang disengaja”

- Bahwa majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menilai Terdakwa Terbukti melakukan Perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, **tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana**

21. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana tercantum didalam website Mahkamah Agung yang mencantumkan hasil penelitian putusan terkait dengan kekayaan negara yang dipisahkan dengan diantaranya mencantumkan sebagai berikut: “Bahwa diperlukan sosialisasi yang meluas dan dengan berbagai macam cara dan bentuk untuk menegaskan kembali arti dan makna uang Negara serta kerugian Negara secara benar dan dapat diterima secara akademis, **bahwa secara ilmiah dan universal kekayaan Negara yang dipisahkan adalah bukan lagi sebagai uang Negara dengan segala konsekwensinya yang harus dianut dan ditaati. Juga perlu didorong keberanian para hakim untuk memulai secara profesional,** untuk memberi putusan-putusan yang mendukung pemahaman atas makna uang Negara/kerugian Negara secara benar. Bahwasannya kekayaan Negara/uang Negara yang dipisahkan adalah BUKAN UANG NEGARA, dengan akibat hukum harus membebaskan seseorang sekalipun, bila nyata-nyata klaim pemidanaan tersebut atas kekayaan Negara yang telah dipisahkan atau dalam sebuah BUMN” (Sumber: <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/762-interpretasi-tentang-makna-uang-negara-dan-kerugian-negara-dalam-perkara-pidana-korupsi-terkait-bumn>)

22. Bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf A mengenai Rumusan Kamar Pidana, dalam Point ke 4 disebutkan; " *Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan Penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk keuangan negara*";
23. Bahwa keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 didalam Kamar Pidana, tentu seharus dimaknai dengan adanya ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVI/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang telah diikuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia didalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 Atas Nama Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah Alias Karen Galaila Agustiawan Alias Karen Agustiawan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3849 K/Pid.Sus/2019 Atas nama Terdakwa Ferederick St Siahaan yang pada Pokoknya Anak Perusahaan BUMN tidak dapat dipersamakan dengan BUMN, sehingga Kerugian Anak perusahaan BUMN bukanlah merupakan Kerugian Negara;
24. Bahwa dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dapat menjadi acuan dalam melakukan penafsiran terhadap ketentuan kerugian Anak Perusahaan BUMN yang bukan merupakan Negara, terkecuali bagi anak perusahaan BUMN yang diperlakukan sama dengan BUMN sebagaimana ketentuan yang terdapat didalam Pasal 2A ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
25. Bahwa didalam Ketentuan PP No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN mengatur ketentuan sebagai berikut:

(7) Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut:

- a. Mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau
- b. Mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN;

26. Bahwa meskipun demikian BPK RI dalam melakukan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang nomor 15 Tahun Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang tetap melakukan Pemeriksaan terhadap Anak Perusahaan BUMN dan atau badan Usaha yang mengelola Keuangan Karyawan BUMN seperti Dana pension Pertamina, dan menganggap ada kerugian negara dalam kegiatan tersebut karena ada pelanggaran peraturan internal perusahaan sehingga dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan dipidana dengan perbuatan tindak pidana korupsi.

27. Bahwa Tindakan Pemeriksaan BPK RI Terhadap Anak Perusahaan BUMN atau badan usaha yang mengelola keuangan karyawan BUMN yang tidak termasuk didalam PP 72 Tahun 2016, telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 G ayat 91) UUD 1945, selain itu pemeriksaan yang dilakukan BPK RI juga, bertentangan dengan Prinsip Perumusan Tindak Pidana yang harus memenuhi prinsip hukum tertulis (Lex Scripta), harus ditafsirkan seperti dibaca (Lex Stricta) dan tidak Multitafsir (Lex Certa) oleh karenanya bertentangan dengan Prinsip negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945

28. Bahwa Pemeriksaan dan Perhitungan BPK RI seharusnya menjadi peran penting dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam suatu perbuatan bukan justru dipakai untuk mengaminkan adanya suatu tindak pidana sehingga atas adanya perhitungan BPK RI tersebut kemudian menjadi perbuatan tindak pidana korupsi, terlebih setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016, dimana unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*Potential Loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*Actual Loss*);
29. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai akibat dari tindakan BPK RI yang melakukan pemeriksaan meskipun bukan merupakan tugas dan wewenangnya, hal ini mengingat pada saat dilakukan pemeriksaan Pemohon bukan merupakan pejabat negara, Bukan pegawai BUMN dan bukan mengelola keuangan negara;
30. Bahwa atas hal tersebut ketentuan pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang nomor 15 Tahun Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sepanjang frase Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara sepanjang tidak dimaknai dengan Adanya Penyertaan Modal Secara Langsung yang diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mendapatkan tugas untuk mengelola sumber daya alam atau kepentingan umum, mendapatkan fasilitas negara dalam mengelola keuangan negara maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945;

V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar kiranya dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

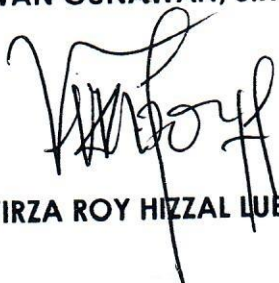
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang nomor 15 Tahun Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945, sepanjang tidak dimaknai adanya penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah secara langsung terhadap BUMN/BUMD, mendapatkan penugasan secara langsung dari Pemerintah untuk mengelola Sumber Daya Alam atau melaksanakan pelayanan umum atau Mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk mengelola keuangan negara.
- Menyatakan pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang nomor 15 Tahun Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tidak mempunyai kekeutan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai adanya penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah secara langsung terhadap BUMN/BUMD, mendapatkan penugasan secara langsung dari Pemerintah untuk mengelola Sumber Daya Alam atau melaksanakan pelayanan umum atau Mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk mengelola keuangan negara
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon,**



IWAN GUNAWAN, S.H.,M.H.



VIRZA ROY HIZZAL LUBIS, S.H., M.H



DR. SUARTINI, S.H.,M.H.,



ADE YAN YAN HASBULLAH, SH